

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

- Tahun Sidang : 2022 – 2023
- Masa Persidangan : I
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Pimpinan DPRD dengan Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga (FLKP)
- Sifat Rapat : Terbuka Untuk Umum
- Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2022
- Pukul : 09.00 WIB – selesai
- Tempat : Ruang Paripurna DPRD Kab. Purbalingga
- Acara : Penyampaian Aspirasi Penolakan Kenaikan BBM.
- Pimpinan Rapat : H.R. Bambang Irawan, S.H. (Ketua DPRD Kab. Purbalingga)
- Sekretaris Rapat : Edhy Suryono, S.Sos., M.M. (Sekretaris DPRD)
- Hadir Rapat :
1. H.R. Bambang Irawan, S.H. (Ketua DPRD Kab. Purbalingga).
 2. LSM Sangga Langit
 - i. Icus Susilo
 - ii. Soleman
 - iii. Saridi
 - iv. Eko
 - v. Arif
 3. LSM Garda Anak Bangsa
 - i. Sentot
 - ii. Sugeng
 - iii. Galih
 - iv. Erwin
 - v. Bud
 - vi. Jatun
 - vii. Muji
 4. LSM GMBI
 - i. Teguh A
 - ii. Alif Setio Aji
 - iii. Fryan Imam N
 - iv. Joko H
 - v. Ade Pramuja
 - vi. Arif Setiawan
 5. Lindu Aji Perwira
 - i. Roni
 - ii. Sinyo

- iii. Wahyono
- iv. Lukman
- 6. LSM BPPI
 - i. Tito R
 - ii. Is B. Aji
 - iii. Eko Yulianto
 - iv. Beni
 - v. Upik Adi Anto

Hasil Dengar Pendapat Umum:

1. FLKP berpendapat bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM cukup terasa, sehingga dari pihak FLKP secara tegas menolak adanya kenaikan harga BBM dan meminta agar harga BBM tidak dinaikkan karena berdampak pada daya beli masyarakat. Sehingga diharapkan DPRD Purbalingga dapat mengakomodir, menyerap aspirasi dan menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat Purbalingga adalah **menolak**.
 - a. Ada 4 (empat) tuntutan dari GMBI:
 - i. Kembalikan subsidi BBM seperti semula untuk jenis pertalite dan jenis solar.
 - ii. Berantas mafia minyak.
 - iii. Percepat penyaluran BBM bersubsidi.
 - iv. Permudah masyarakat mengakses BBM bersubsidi yang berbasis aplikasi dengan cara membuka gerai MyPertamina di seluruh Indonesia, minimal di setiap Desa. Dalam hal ini GMBI siap membantu Pemerintah untuk melaksanakan poin ke-4.
 - b. Ada 4 (empat) tuntutan dari Lindu Aji:
 - i. Lindu Aji secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
 - ii. Pemerintah diharapkan secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
 - iii. Pemerintah Daerah diharapkan segera menerapkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
 - iv. Pemerintah Daerah diharapkan untuk membuka atau melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM yang bersubsidi sebagai bentuk transparansi.
2. Secara keseluruhan, ada 4 (empat) poin pernyataan sikap dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat yang tergabung dalam Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga (FLKP):
 - a. Menolak tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan dikhawatirkan juga jumlah masyarakat miskin akan semakin bertambah.
 - b. Mendesak Pemerintah secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
 - c. Mendesak Pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
 - d. Mendesak kepada Pemerintah melakukan re-alokasi anggaran Kementerian atau Lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

- Tahun Sidang : 2021 – 2022
- Masa Persidangan : II
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Pimpinan DPRD dengan DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Purbalingga
- Hari/Tanggal : Senin, 14 Februari 2022
- Pukul : 11.00 WIB – selesai
- Tempat : Ruang Transit DPRD Kab. Purbalingga
- Acara Purbalingga : Penyampaian Press Release Audiensi Bersama Ketua DPRD Kab. Purbalingga
- Pimpinan Rapat : H.R. Bambang Irawan, S.H. (Ketua DPRD Kab. Purbalingga)
- Sekretaris Rapat : Edhy Suryono, S.Sos., M.M. (Sekretaris DPRD)
- Hadir Rapat :
1. Dedi Priyantoro, S.Pd. (Ketua DPD ABPEDSI Kab. Purbalingga/BPD Limbangan)
 2. Drs. H. Sumarmo (Wakil Ketua DPD ABPEDSI Kab. Purbalingga/BPD Kalimanah)
 3. Irfan Nisa'i, S.Pd., S.Pd.I (BPD Mrebet)
 4. Suratno, S.Pd. (BPD Larangan)
 5. Andris Subekti, S.IP. (BPD Lamuk)
 6. Sundiarto, S.Pd. SD. (BPD Kembangan)
 7. Sutarno, S.Sos. (DBK Kertanegara)
 8. Supratno (BPD Gembong)
 9. Bangun Sularto, S.Pd. (BPD Sumilir)
 10. Furin Nurdianto, S.Pd., M.Si. (BPD Karanglewas)

Hasil Dengar Pendapat Umum:

1. BPD Kab. Purbalingga berharap ada pelatihan rutin untuk meningkatkan kualitas kemampuan anggota BPD.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Badan Permusyawaratan Desa diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Sehingga Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dirasa belum mengikuti ketentuan terbaru dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu untuk ditinjau ulang.

3. BPD berharap ada peningkatan terhadap tunjangan bagi Ketua dan Anggota BPD Kab. Purbalingga.
 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan di PP Nomor 18 Tahun 2017, ketentuan mengenai tunjangan BPD menyesuaikan kemampuan Keuangan Daerah dan sesuai dengan rumus perhitungan yang telah ditentukan. Peningkatan honorarium dapat ditinjau kembali dengan pembahasan terlebih dahulu dengan tim ahli, diharapkan ketentuan mengenai honorarium ini dapat masuk dalam Peraturan Bupati.
4. BPD menginginkan agar dibentuk aturan jelas yang mengatur tentang tanah bengkok yang merupakan tanah kas desa yang secara hukum menjadi aset kekayaan desa.
5. BPD berharap agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan eksistensi dan peranan BumDes dalam Peraturan Daerah.

Disusun di Purbalingga, 20 Mei 2018

Tempat: Ruang Terpadu DPRD Kab. Purbalingga

Judul: Penyempurnaan Pokok Pokok Anggaran Bersama Ketua DPRD Kab.

Purbalingga

Penyusunan: H. D. Bambang Indran, S.H. (Ketua DPRD Kab. Purbalingga)

Sejarah: H. D. Bambang Indran, S.H., M.M. (Sekretaris DPRD)

- Redaksi:
1. H. D. Bambang Indran, S.H. (Ketua DPRD Kab. Purbalingga)
 2. H. D. Bambang Indran, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Purbalingga)
 3. H. D. Bambang Indran, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Purbalingga)
 4. H. D. Bambang Indran, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Purbalingga)
 5. H. D. Bambang Indran, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Purbalingga)
 6. H. D. Bambang Indran, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Purbalingga)
 7. H. D. Bambang Indran, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Purbalingga)
 8. H. D. Bambang Indran, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Purbalingga)
 9. H. D. Bambang Indran, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Purbalingga)
 10. H. D. Bambang Indran, S.H. (Sekretaris DPRD Kab. Purbalingga)

Tempat: Ruang Terpadu DPRD Kab. Purbalingga

1. BPD Kab. Purbalingga meminta agar pemerintah kabupaten Purbalingga meningkatkan anggaran BPD.
2. BPD Kab. Purbalingga meminta agar pemerintah kabupaten Purbalingga meningkatkan anggaran BPD untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di desa-desa yang belum terjangkau oleh pemerintah kabupaten Purbalingga.
3. BPD Kab. Purbalingga meminta agar pemerintah kabupaten Purbalingga meningkatkan anggaran BPD untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di desa-desa yang belum terjangkau oleh pemerintah kabupaten Purbalingga.